

LAPORAN AKHIR

**PENYUSUNAN MASTER PLAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Peneliti

**Dr. Yennita Roza
Rahmita Ningsih, SE. M.Hum
Dr. Leny Nofianti, M. Si, Ak, CA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sumber Data	4
1.4 Instrumen dan Proses Pengumpulan Data	4
1.5 Analisis Data	4
1.6 Keluaran yang Diharapkan	5
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	8
2.1. Globalisasi dan Tantangan Dunia Pendidikan	8
2.2. Karakteristik Pendidikan Masa Depan	14
2.3. Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional	17
2.3.1. Pemerataan dan Perluasan Akses	17
2.3.2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing	27
2.3.3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik....	35
BAB III KONDISI UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	45
3.1. Kondisi Wilayah Kabupaten Inhil	45
3.2. Administrasi Pemerintahan Daerah	46
3.3. Demografi	48
3.4. Geografi	49
3.5. Sosial Ekonomi dan Budaya	50
3.6. Transportasi dan Komunikasi	55
BAB IV KONDISI PENDIDIKAN KABUPATEN INHIL	56
4.1. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal	56
4.1.1. Data Pendidikan Guru	56
4.2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	56
4.2.1. Data Ketersediaan Sekolah	56
4.2.2. Data Ketersediaan Ruang Kelas	58
4.2.3. Data Ketersediaan Sarana Sekolah	59
4.2.4. Data Kecukupan Guru	60
4.2.4.a Data Kecukupan Guru SD	60
4.2.4.b Data Kecukupan Guru MI	66
4.2.5. Data Pendidikan Guru	69
4.3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)	71
4.3.1. Data Ketersediaan Sekolah	71
4.3.2. Data Ketersediaan Ruang Kelas	72
4.3.3. Data Kelengkapan Sarana Sekolah	73
4.3.4. Data Kecukupan Guru	74

4.3.4.a. Data Kecukupan Guru SMP.....	74
4.3.4.b. Data Kecukupan Guru MTs	85
4.3.5. Data Pendidikan Guru	96
4.4. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).....	97
4.4.1. Data Ketersediaan Sekolah.....	97
4.4.2. Data Ketersediaan Ruang Kelas.....	98
4.4.3. Data Kelengkapan Sarana Sekolah.....	99
4.4.4. Data Kecukupan Guru.....	100
4.4.4.a. Data Kecukupan Guru SMA.....	100
4.4.4.b. Data Kecukupan Guru SMK	116
4.4.4.c. Data Kecukupan Guru MA	129
4.4.5. Data Pendidikan Guru.....	144
4.5. Temuan Khusus.....	147
BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN INHIL TAHUN 2014-2018	191
5.1. Strategi Umum	191
5.2. Indikator Keberhasilan / Milestone.....	194
5.3. Masalah-malasal yang Dihadapi	196
5.4. Arah dan Kebijakan Pengembangan Pendidikan	199
5.5. Rencana Lima Tahun Pendidikan (2009-2013)	200
5.6. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing	209
5.7. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik....	213
5.8. Rencana Pemantauan dan Evaluasi.....	218
BAB VI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	224
A. Prioritas Program Berdasarkan Tiga Program Utama	224
B. Prioritas Program Berdasarkan Jenjang Pendidikan	224
BAB VII PENUTUP	227
A. Kesimpulan	227
B. Rekomendasi	230
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara filosofis tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks rumah tangga negara, pendidikan merupakan hak setiap warga negara maka di dalamnya mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa: (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka menghidupkan kecerdasan bangsa; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 diperjelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa *-pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab*.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup(*lifeskills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025.

Karena itu pengelolaan sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu, efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan harus berorientasi pada upaya peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat. Dalam konteks inilah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kewajiban dan tugas dalam memberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintahan. Demikian pula bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan fondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya. Dalam setiap upaya pembangunan, penting untuk senantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat.

Filosofis dalam penyusunan Master Plan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir ini dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konsitusi tersebut. *Master Plan* pendidikan ini sebagai acuan/pedoman

bagi para pemangku kepentingan (*stake holders*) di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan manusia yang berilmu, berpengetahuan, mampu membangun dan menguasai teknologi, serta berdaya saing, yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kegiatan penyusunan *Master Plan* Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk :

- Menyediakan dokumen Rencana Induk (*Master Plan*) Pendidikan Tahun 2013 -2018 sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (cerdas), serta berdaya saing yang berlandaskan Iman dan Taqwa (Imtaq).

Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa isu prioritas, indikasi program, kegiatan dan sasaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan dalam pembangunan bidang pendidikan;

- Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan;
- Mendeskripsikan perkembangan pendidikan selama 5 tahun baik menyangkut kelembagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, maupun manajemen pengelolaan sekolah, dan lain sebagainya;
- Mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan nyata yang diperlukan untuk pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan informal dan Nonformal, dan Pendidikan

Tinggi;

- Menyusun rencana implementasi peningkatan mutu pendidikan dari setiap jenjang pendidikan sesuai kurikulum berbasis kompetensi;
- Mengusulkan untuk melanjutkan usulan rekomendasi peningkatan efisiensi dengan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah pada setiap jenjang pendidikan (TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK);
- Mendeskripsikan perkembangan peningkatan relevansi pendidikan terhadap ketenagakerjaan;
- Mendeskripsikan rasionalitas pemerataan dan perluasan pendidikan secara politis pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- Mendeskripsikan pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dan atau Komite Sekolah.

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (berupa kuesioner yang disebar) dan dilakukan wawancara ke sekolah pada 20 Kecamatan di Indragiri Hilir. dan data sekunder (berupa *organizational record*).

1.4. Instrument dan Proses Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik *in depth interview*, penyebaran kuesioner dan telaah *organizational record*.

1.5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif bertumpu pada *triangulation data* yang dihasilkan dari tiga metode: interview, *participant observation*, dan telaah catatan organisasi (*document records*). Selain itu untuk merumuskan strategi, program dan kebijakan juga menggunakan analisis SWOT.

Secara metodologis, penyusunan masterplan pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan melalui beberapa tahapan. Penyusunan masterplan ini diawali dengan merumuskan gagasan awal, yang selanjutnya dibahas dalam FGD

pada diskusi laporan pendahuluan. Kegiatan FGD ini dimaksudkan untuk menggali dan menjangkau pendapat dari berbagai pihak. Hasilnya disajikan dalam bentuk draft-awal masterplan pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui diskusi laporan antara, draft tersebut disempurnakan untuk difinalisasi sebagai laporan akhir. Pemikiran yang berkembang dan muncul selama pra workshop/FGD selanjutnya dibahas, digali, dianalisis, dirumuskan butir-butir penting dan hasilnya berupa Draft Masterplan. Hasil Draft Masterplan ini kemudian dilakukan penyempurnaan berdasarkan review internal yang melibatkan mulai dari sekolah (Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas), Dewan Pendidikan maupun pejabat dalam jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah disempurnakan, maka Masterplan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dinyatakan final dan selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.6. Keluaran Yang Diharapkan

• Kompilasi Data.

Pekerjaan kompilasi data merupakan proses seleksi data, tabulasi data dan pengelompokan/sistematika data sesuai dengan kebutuhan. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya kompilasi data yang disajikan secara sistematis dan siap dianalisa, dilengkapi dengan table, angka-angka, diagram dan peta.

Jenis data dan sistematika kompilasi data yang disajikan adalah semua data-data yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan.

• Laporan

Laporan berisi himpunan semua data, informasi, hasil analisa dan evaluasi yang telah disusun, dirangkum dan disimpulkan. Laporan memuat pula tentang hasil kegiatan diskusi dan presentase sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan hasil Penyusunan Masterplan Pendidikan. Laporan-laporan yang disampaikan adalah:

1. Laporan Pendahuluan.

Disusun paling lama 30 (tiga puluh) hari kelender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Laporan ini berisi rencana kerja, metode dan jadwal penugasan tenaga ahli dan personil pendukung lainnya dalam penyelesaian pekerjaan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

Laporan dipaparkan dalam rapat pembahasan yang menghadirkan nara sumber, tim teknis dan Dinas/SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Laporan Antara

Disusun paling lama pada hari ke 90 (sembilan puluh) hari kelender sejak diterbitkannya SPMK.

Laporan ini berisi tentang hasil kajian literature dan kompilasi data hasil survey dilapangan. Laporan antara ini disampaikan sebanyak 5 (Lima) eksemplar.

3. Draf Laporan Akhir

Disusun paling lama pada hari ke 150 (seratus lima puluh) hari kelender kerja sejak diterbitkannya SPMK dan disampaikan sebanyak 5 (Lima) eksemplar.

Draf Laporan Akhir memuat kajian final tentang pemetaan atau Mapping Pendidikan berdasarkan analisa data yang ada.

Laporan ini dipaparkan dalam rapat pembahasan yang menghadirkan nara sumber, tim teknis, Dinas/SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Laporan Akhir.

Disusun paling lama sampai pada hari ke 180 (seratus delapan puluh) hari kelender kerja sejak dikeluarkannya SPMK.

Laporan ini merupakan hasil akhir kerja konsultan atau pihak kedua yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Mapping Pendidikan.

Seluruh hasil pekerjaan pihak kedua dalam bentuk buku sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar dan diserahkan pada pihak pertama (Owner) pada akhir pekerjaan. Keseluruhan laporan harus disimpan dalam bentuk compact disk dan serahkan bersamaan pada waktu penyerahan laporan akhir tersebut.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

2.1 Globalisasi dan Tantangan Dunia Pendidikan

Globalisasi telah menjadikan bangsa-bangsa di dunia berkembang menjadi dunia tanpa batas baik dari segi geografis, politis, ekonomis, maupun sosial budaya. Tidak satu pun negara, baik di belahan utara yang lebih maju, maupun di belahan selatan yang tertinggal tanpa saling berhubungan. Namun itu bersifat timbal balik satu sama lain (*reciprocal relationship*). Namun dalam hubungan seperti itu seringkali terjadi, siapa yang lebih siap dan lebih kuat akan menang, baik secara langsung maupun tidak langsung pihak yang kuat ikut menentukan nasib dan masa depan negara yang kurang siap dan lemah.

Berbagai istilah seperti ketergantungan ekonomi, ketergantungan teknologi dan sebagainya merupakan gambaran yang membuktikan adanya hubungan timbal balik yang kurang seimbang tersebut. Hubungan seperti ini akan berlanjut terus menerus, kecuali jika ada motivasi yang kuat dan usaha yang nyata berkelanjutan dari negara yang tertinggal dan kurang maju untuk menyiapkan diri secara baik, sehingga pada saatnya mampu berdiri setara dengan negara yang lebih dulu maju. Acapkali kemampuan untuk mendayagunakan potensi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang dimiliki dapat menjadi obat mujarab yang menyembuhkan penyakit ketergantungan ini.

Pendayagunaan berbagai potensi tersebut pada hakikatnya harus dilalui melalui penanaman modal jangka panjang (*long term investment*) yang salah satu pilar utamanya adalah pendidikan. Melalui pendidikan dapat digali dan dikembangkan baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif SDM suatu bangsa, sehingga berbagai ketertinggalan yang ada lambat laun dapat dikejar dan pada gilirannya terjadi kesejajaran hubungan antar bangsa yang simbiosis mutualistik atas dasar menang-menang (*win-win solution*).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut maka paradigma hambatan dan kendala harus diubah menjadi paradigma peluang. Pengelolaan pendidikan harus dititikberatkan kiprahnya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, baik dari segi konteks, masukan, proses, keluaran dan dampaknya (*context, input, process, output and outcome*). Pendidikan yang bermutu seperti ini diharapkan dapat menghasilkan keunggulan SDM, yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik atau aspek kognitif atau aspek ciptanya sendiri, tetapi unggul secara terpadu karena sinergi antara aspek cipta, rasa (afektif) dan karsa dan karyanya.

Dari sisi lain lagi, manusia yang unggul adalah manusia paripurna yang mampu menyelaraskan aspek intelektual, emosional dan spiritual, mampu mengembangkan berbagai potensi kecerdasan majemuk yang dimiliki secara optimal dan seimbang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia yang unggul adalah manusia yang beriman dan bertakwa mulia, berbudi luhur yang tidak segan-segan berkarya, tidak canggung-canggung mencipta semata-mata karena hasrat pengabdianya bagi manusia dan kemanusiaan, bagi negara dan bangsa dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan ini.

Pendidikan merupakan wahana untuk mewujudkan keinginan untuk memanusiakan manusia (humanisasi), membuat manusia menjadi berdaya dalam mengembangkan sisi kemanusiaannya. (humanisasi), pendidikan juga harus memberdayakan manusia (*empowering*), mencerahkan (*enlightening*) dan memuliakan kehidupan (*ennobling*). Bahwa SDM menjadi kunci pemberdayaan tidak dapat dipungkiri, hal ini sesuai dengan pengalaman dunia bahwa berbagai kegagalan proyek rekayasa (*engineering projects*) 65% karena kesalahan manusia (*human errors*). Oleh sebab itu melalui pendidikan, SDM harus dirancang menjadi soko guru modal maya (*virtual capital*), yang diperkuat menjadi jejaring di berbagai bidang (*networking*) dengan semangat desentralisasi untuk mengembangkan kepemilikan berbagai akses sumber daya (*decentralization in the spirit of extended resources*) disertai visi yang etis (*ethical vision*) berbingkai moral (*moral based*) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Pendidikan sebenarnya tidak sekedar investasi jangka panjang. Karena sekaligus juga dapat merupakan investasi jangka pendek. Sistem pendidikan yang disusun dengan benar dan memiliki derajat akuntabilitas tinggi, terbukti dalam jangka pendek juga memberikan sumbangan yang berarti bagi devisa negara. Sebagai contoh banyak siswa atau mahasiswa yang belajar di negara yang memiliki tradisi pendidikan yang akuntabel. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Jepang, Malaysia dan Singapura menanggung banyak devisa, karena sistem pendidikannya yang tangguh dan akuntabel, sehingga kedatangan banyak siswa dan mahasiswa dari luar negeri. Walhasil, pendidikan yang bermutu justru memberi balikan dampak ekonomi yang positif.

Dalam kaitan ini, perlu penyadaran akan pentingnya apresiasi dari pemegang kebijakan (eksekutif dan legislatif) bahwa pendidikan yang bermutu merupakan investasi yang menjanjikan. Oleh sebab itu pemikiran yang gamang dan meragukan akan pentingnya investasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan adalah pemikiran yang kadaluwarsa. Diperlukan langkah bersama dan sinergis untuk memperbaiki kondisi pendidikan yang semakin terpuruk.

Pergeseran dan perubahan struktural di bidang ekonomi dan tenaga kerja, percepatan perkembangan ilmu dan teknologi, dan perubahan jenis keterampilan kerja yang diperlukan, akan menimbulkan sejumlah kecenderungan dan tantangan baru yang pada gilirannya berakibat kepada perubahan sistem pendidikan di masa depan. Diantara perubahan penting itu adalah, (1) makin pentingnya orientasi nilai tambah, (2) perubahan dalam struktur sosial sebagai proses penemuan bentuk transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, dan (3) dampak dari proses globalisasi.

Adapun tantangan yang dimaksud adalah:

Tantangan pertama, yakni makin pentingnya orientasi nilai tambah (*value-added orientation*) terkait makin mendesaknya kebutuhan untuk menaikkan tingkat produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai wahana untuk mempertahankan dan memperbaiki seluruh tatanan pembangunan sosial. Orientasi nilai tambah untuk menaikkan daya saing manusia Indonesia hanya dapat diraih

dengan menciptakan SDM yang berkualitas unggul yang menguasai iptek secara efektif, dan mampu beradaptasi terhadap budaya industri nasional.

Tantangan kedua, merupakan akibat dari suatu proses yang belum selesai dan belum menemukan bentuk bakunya, yakni transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi ini timbul sebagai konsekuensi dari makin lajunya peran dan posisi sektor industri yang memerlukan berbagai keterampilan dan keahlian inovatif yang kondusif dengan perkembangan ipteks. Berbagai posisi dan keahlian baru juga menyebabkan perubahan dalam struktur fisis dan sosial seiring dengan pergeseran berbagai sistem nilai. Perubahan sistem nilai dapat memunculkan konflik kepentingan yang harus disikapi dengan bijak, yakni konflik antara pemegang nilai tradisional yang berlandaskan pada budaya agraris dengan pemegang nilai baru yang berpegang pada budaya industri.

Tantangan ketiga, berkait dengan proses perkembangan arus globalisasi. Globalisasi yang semakin meluas dan masif tak dapat dihindari akan berpengaruh kepada kondisi sosial politik bahkan budaya bangsa Indonesia. Globalisasi akan melahirkan persaingan yang semakin intensif lintas kultural dan lintas bangsa, terutama sekali dalam bidang ekonomi seperti halnya dalam bidang ipteks dan sosial budaya. Hanya bangsa yang memiliki daya saing tinggi dalam bidang ekonomi dan ipteks yang akan mampu meraih dan memanfaatkan (*opportunity*) yang terbuka luas dalam era global, sebaliknya bangsa yang kurang siap akan melihat kesempatan tersebut sebagai ancaman (*threat*).

Sistem pendidikan Indonesia ke depan harus kondusif dengan ketiga tantangan tersebut di atas. Dengan kata lain dalam kerangka SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity and Threat*) maka pendidikan ke depan harus mampu mengoptimalkan kekuatan (*strenght*) potensi bangsa untuk ditumbuhkembangkan secara adaptif dan fleksibel, mampu melihat kekurangan (*weakness*) dan kelemahan potensi bangsa untuk diperkuat dan ditumbuhkan sehingga secara berangsur-angsur dapat setara dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Tantangan Keempat, perkembangan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat mendorong kearah e-learning. Yang perlu

dirumuskan ke depan adalah bagaimana optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi tersebut untuk mendukung kemajuan pendidikan dan kebudayaan. Pergeseran struktur ekonomi terjadi sebagai akibat perubahan yang berkelanjutan dari dominasi sektor ekonomi tradisional dan informal menjadi dominasi oleh sektor ekonomi. Industrial. Makin cepat ekspansi sektor ekonomi industrial, makin cepat pula transformasi struktur ekonomi menjadi institusi sosial yang lebih maju. Dalam hubungan ini peran pendidikan menjadi strategis karena diharapkan turut membantu proses akselerasi transformasi struktur ekonomi tersebut secara sepadan, relevan dan seimbang. Pengertian seimbang disini menggambarkan upaya agar proses transformasi tersebut dapat meminimalisasi berbagai konflik nilai yang pasti terjadi.

Pergeseran struktural lapangan kerja terjadi sebagai akibat proporsi yang tidak seimbang antara tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dengan proporsi tenaga kerja yang berasal dari pendidikan yang lebih rendah. Hal semacam ini akan memberikan efek ganda pada struktur lapangan kerja. *Pertama*, efek terhadap efisiensi dan kualitas kerja karena lulusan perguruan tinggi lebih mampu menggunakan teknologi maju secara efektif yang diharapkan memberi dampak positif pada produktivitas. *Kedua*, efek berupa penciptaan lapangan kerja baru yang pada gilirannya berdampak pula terhadap berbagai aktivitas sektor ekonomi, berlandaskan asumsi bahwa lulusan universitas lebih mampu berwirausaha.

Fakta menunjukkan, dalam menghadapi era perdagangan bebas di tingkat Asia, bahkan di tingkat ASEAN pun kita kedodoran, serbuan berbagai institusi pendidikan dari wilayah Asia-Pasifik saja ke dalam negeri telah membuat institusi pendidikan kita kewalahan. Apalagi nanti pada tahun 2025 saat era global perdagangan bebas menjadi kenyataan tentu kita akan menjadi semakin tidak berdaya, jika kesiapan dan cara pandang kita tentang esensi pendidikan tidak berubah.

Saat ini pendidikan di Indonesia, sebagaimana sebagian besar negara di dunia sedang dalam proses menuju globalisasi baik dalam aspek teknologi, ekonomi, sosial, politik, kultural dan pembelajaran (Yin Cheong Cheng, 2001).

Dunia bergerak amat cepat menjadi desa global, dalam situasi itu berbagai bagian dunia menjadi bagian dari jejaring (*networked*) dan mendunia (*globalized*) secara cepat melalui internet dan berbagai jenis teknologi informasi, komunikasi dan transportasi (Naisbitt dan Aburdence, 1991).

Dalam kaitan dengan era global, sesuai dengan apa yang dilansir oleh Fukuyama bahwa akan terjadi kondisi negara yang tanpa batas (*borderless state*) maka agaknya pendidikan di Indonesia, mulai abad XXI ini, tidak bisa dielakkan lagi akan diwarnai oleh serbuan lembaga pendidikan dari negara lain. Apalagi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah membuka kesempatan untuk itu. Hal semacam ini tentu akan merupakan tantangan nasional bagi Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Minimal, ada dua ciri penting terkait dengan lingkungan eksternal yang patut diantisipasi. *Pertama*, perubahan dunia termasuk di dalamnya perubahan iptekserta perubahan sosio kultural, akibat interaksi transisional yang makin intensif akan makin cepat laju akselerasinya, hal ini seiring dengan kemajuan pesat dalam ICT (*Information, Communication, and Technology*). Kedua, tantangan negara bangsa kedepan akan semakin berat, sementara jumlah penduduk makin bertambah, sumberdaya alam makin berkurang, persaingan antar bangsa juga makin ketat dan terbuka.

Pemerintah dapat saja membuat sejumlah Peraturan Pemerintah sebagai regulasi yang dapat memberi perlindungan kepada lembaga pendidikan lokal/nasional. Namun pada akhirnya masyarakatlah yang akan menentukan, karena pilihan ada pada mereka, dan itu amat bergantung kepada mutu lembaga pendidikan nasional yang bersangkutan. Pengalaman menunjukkan banyak orang tua yang mengirimkan anaknya sekolah di luar negeri, dengan keyakinan memperoleh pendidikan yang lebih baik dibanding jika sekolah di dalam negeri.

Dengan demikian, hal ini hanya satu jawaban untuk mampu menghadapi tantangan tersebut, yakni bahwa sejak di tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi pendidikan Indonesia harus dirancang berlandaskan pada mutu,

berorientasi pada pengembangan mutu, tiada hari tanpa perbaikan, *continuous improvement, kaizen!*

2.2. Karakteristik Pendidikan Masa Depan

Paling tidak terdapat dua faktor yang dihadapi oleh pendidikan di masa depan, yaitu semakin tidak jelasnya batas negara, dan perkembangan dunia yang serba cepat dan bahkan seringkali tidak terduga. *Borderless world* menuntut pendidikan di satu negara dan negara lain tidak boleh terlalu jauh berbeda, karena manfaat pendidikan harus mampu memberikan bekal untuk kehidupan yang seakan tanpa batas negara. Disamping harus mampu mengembangkan keunggulan budaya setempat, pendidikan harus mampu menerapkan standar dasar yang dapat ditransfer (*transferable*), ketika lulusan harus menghadapi tuntutan kehidupan global.

Terkait dengan perkembangan dunia yang seakan tidak terduga, Charles Handy(1997), filosof bisnis terkemuka dari Inggris, dalam kumpulan pemikiran para pakar manajemen berjudul *Rethinking the Future*, menyatakan bahwa dunia ke depan adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian (*uncertainly*). Oleh sebab itu tidak ada lagi jawaban tunggal dalam dunia pendidikan. Paradigma pendidikan konvensional menyatakan bahwa seluruh masalah di dunia telah terpecahkan serta bawa para guru mengetahui semua jawaban segala persoalan, harus ditinggalkan.

Dalam kondisi seperti itu, Handy menyarankan untuk selalu optimis ketimbang tenggelam dalam pesimisme. Hidup seharusnya dijalani seperti perahu mengikuti air mengalir dengan sesekali mengubah arah kemudi untuk menghindari benturan bebatuan atau pusaran air (*all we can do now is go with the flow, and try to steer things a little*). Masa depan dihadapi dengan penuh kegairahan, kegairahan terbesar terkait dengan masa depan adalah karena kita dapat membentuknya sesuai dengan keinginan dan potensi kita (*The great excitement of the future is that we can shape it*).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, pendidikan di masa depan tidak lagi menekankan pada pemberian informasi/pengetahuan, tetapi mengembangkan kemampuan anak didik bagaimana menggali informasi dan menganalisisnya menjadi suatu simpulan serta menggunakannya untuk memecahkan problema kehidupan secara arif dan kreatif. Tugas guru bukan lagi menyampaikan informasi atau pengetahuan, tetapi mengembangkan kemampuan belajar anak (*learning how to learn*). Belajar dalam konteks ini dimaknai sebagai aktivitas untuk menggali dan memilih informasi yang diperlukan, menganalisis dan menggunakannya secara bijak dalam memecahkan problema kehidupan yang dihadapi.

Pemikiran tentang Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skill education/LSE*) yang berkembang akhir-akhir ini juga penting untuk dicermati. LSE ingin mengubah paradigma pendidikan yang cenderung diarahkan untuk penguasaan ilmu pengetahuan, menjadi pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan menghadapi kehidupan. Dalam konteks ini penguasaan ilmu pengetahuan bukan dihilangkan, tetapi digeser menjadi alat dan bukan tujuan.

Dengan demikian jenis dan jenjang ilmu pengetahuan yang dipelajari sesuai dengan tantangan kehidupan yang akan dihadapi anak didik. Bahwa sistem pendidikan kita saat ini adalah salah atau belum tepat arahnya, banyak para pakar yang setuju dan kita harus mengubahnya. Namun hal itu bukan berarti bahwa kita harus bebas dari sekolah (*deschooling society*) seperti gagasan Ivan Illich. Sejalan dengan Handy, kesalahan terbesar sistem sekolah saat ini adalah menyebabkan terjadinya manusia-manusia yang tidak terampil (*being deskilling*) menentukan masa depannya sendiri akibat sering dijejali dengan jawaban tunggal bagi suatu masalah. Hal semacam itu yang harus diubah. Sekolah harusnya mampu memberi pencerahan dan pemberdayaan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan masalah berujung terbuka dan berkesinambungan (*a succession of open ended problem*), tanpa satu jawaban, penyelesaian tunggal yang benar, namun toh, jawabannya sendiri, senantiasa harus dicari, digali dan dieksplorasi dari dunia nyata.

Sistem sekolah harus mampu menjawab pertanyaan mendasar : "Apakah sistem sekolah memberikan makna bagi kehidupan anak didik setelah lulus?". Kecuali hal-hal yang bersifat konseptual, pendidikan tahun 2025 ke depan juga perlu memperhitungkan implikasi berkelanjutan dari penerapan berbagai konsep pendidikan pada awal abad XXI ini. Misalnya Kurikulum Berbasis Kompetensi, konsep Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kontekstual, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahkan mungkin juga dampak penerapan Undang-undang Guru yang sekarang sedang digodok rancangannya.

Sehubungan dengan makin terbukanya persaingan dengan lembaga dari luar negeri yang umumnya bermutu baik, maka di samping menyiapkan semua sekolah untuk memenuhi standar kualitas nasional (yang pada hakekatnya merupakan standar minimal itu) perlu juga dipikirkan untuk menyiapkan sejumlah sekolah yang memenuhi standar internasional, sehingga siap bersaing dengan lembaga sekolah dari luar negeri. Kewajiban pemerintah lah untuk menyiapkan kondisi yang kondusif, baik melalui kebijakan regulasi maupun aksi nyata agar tersedia lembaga pendidikan nasional bermutu internasional yang relevan dan memadai.

Dalam konteks penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah ke depan harus mampu mewujudkan dirinya sebagai miniatur masyarakat belajar (*mini learning society*). Sekolah menjadi wahana pengembangan siswa, bukan sebuah birokrasi yang sarat dengan beban-beban administrasi. Aktivitas di dalamnya adalah sebuah proses pelayanan jasa, murid adalah pelanggan (*client, customer*) yang datang ke sekolah untuk mendapatkan pelayanan, bukan bahan mentah (*raw input*) yang akan dicetak menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan lainnya adalah tenaga profesional yang terus-menerus berinovasi untuk kemajuan sekolah. Konsep sekolah sudah selangkahnya mengacu kepada konsep sekolah efektif (*effective school*), yang

memiliki profil yang kuat, mandiri, inovatif, dan memberikan iklim yang kondusif bagi warganya untuk mengembangkan sikap kritis, kreativitas dan motivasi.

Sekolah harus mampu merepresentasikan karakter kolektif warga sekolah secara keseluruhan (iklim sekolah). Iklim sekolah diupayakan peduli terhadap budaya mutu, budaya progresif, demokratis, partisipasi warga, kejelasan visi dan misi, caring and sharing (peduli dan berbagi) dan sebagainya. Setiap pribadi, dalam konteks *learning person* ini harus senantiasa belajar seumur hidup (*long-life learning*) dalam jejaring masyarakat belajar (*learning society or knowledge society*) yang diperlukan bagi keberhasilan perkembangan majemuk yang berkesinambungan (*continuous multiple development*) baik dari setiap individu dan masyarakat dalam abad baru yang berubah (Peter F. Drucker, 1993).

Persekolahan di masa depan, juga termasuk di Kota Pontianak juga harus mampu memecahkan, paling tidak mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana diketahui, sebagai dampak persaingan yang semakin keras, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat juga semakin tajam. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin tetap miskin. Anak-anak keluarga yang terdidik semakin terdidik, sementara anak-anak keluarga tidak terdidik tetap tidak terdidik.

Persekolahan ke depan harus mampu menjadi tangga mobilitas vertikal bagi mereka yang kurang mampu dan kurang terdidik, sekaligus mampu memotong lingkaran kemiskinan yang banyak memerangkap keluarga di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pendidikan ke depan, harus diarahkan untuk mampu memfasilitasi masyarakat kurang mampu tanpa melupakan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Prinsip *to reach the unreach* perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pendidikan.

2.3 Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional

2.3.1. Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang

sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di eraglobal, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat 95%, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 98,0% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan. Di samping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan\pendidikan menengah. Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, Pemerintah juga melakukan perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler, melalui SMA Terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM-SMA. Oleh karena SMA cenderung semakin meluas jauh di atas SMK, maka Pemerintah lebih mempercepat

pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Pemerintah akan memperluas akses pendidikan tinggi untuk menjawab meningkatnya partisipasi sekolah menengah. Meningkatnya angka partisipasi PT tersebut akan diiringi oleh kebijakan yang mengarah pada pencapaian daya saing lulusan PT secara global. Secara bersamaan, dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu upaya untuk pemenuhan tersebut diantaranya melalui peningkatan jumlah keahlian bidang vokasi melalui institusi politeknik. Selain itu, dikembangkan program *community college* yang merupakan upaya harmonisasi antara pendidikan kejuruan di SMK, pendidikan nonformal berkelanjutan, dan pendidikan vokasi. Di samping itu, peningkatan APK PT dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pelayanan pendidikan yang memadai.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal negara, strategi pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi lebih diarahkan pada peran partisipasi swasta dalam mendirikan lembaga pendidikan tinggi baru. Namun, strategi perluasan akan dikaitkan dengan pencapaian mutu yang lebih baik dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global. Untuk itu, pemerintah akan terus membenahi peraturan dan perundang-undangan serta memperkuat kapasitas kelembagaan yang terkait dengan fungsi pengendalian dan penjaminan mutu.

Kebijakan perluasan pendidikan tinggi juga dilakukan searah dengan upaya membuka kesempatan bagi calon mahasiswa yang berasal dari penduduk di atas usia ideal pendidikan tinggi (>24 th) seperti karyawan, guru, tenaga spesialis industri, termasuk dalam pendidikan nongelar dan pendidikan profesi yang mengutamakan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja industri.

Perluasan akses pendidikan tinggi juga dilakukan melalui pengembangan kapasitas pembelajaran digital jarak jauh yang semakin luas dan efektif.

Universitas Terbuka dan institusi sejenis lainnya ditugaskan untuk mengimplementasikan strategi ini, dengan memanfaatkan secara optimal TIK dalam proses pembelajaran, pengelolaan, dan akses informasi. Dalam kaitan itu, Ditjen Pendidikan Tinggi memprioritaskan investasi infrastruktur TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada Universitas Terbuka dan perguruan tinggi lainnya serta Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan di SD/MI.
- b. Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang Dikdas baik pada sekolah umum maupun madrasah yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan *unit cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang Dikdas melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. Secara bertahap BOS akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan berdasarkan formula (*formula-based funding*) yang memperhitungkan siswa miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.
- c. Membentuk **”SD-SMP Satu Atap”** bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar dalam kebijakan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan guru SD untuk mengajar di SMP pada beberapa mata pelajaran yang relevan atau dengan meningkatkan kompetensi guru sehingga

dapat mengajar di SMP. Selain itu, dilakukan upaya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, baik ruang kelas maupun bangunan sekolah dengan membuat jaringan sekolah antara SMP dengan SD-SD yang ada di wilayah layanannya(*catchment areas*) serta menggabungkan SD-SD yang sudah tidak efisien lagi.

- d. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/ inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. Disamping itu, untuk memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui optimalisasi daya tampung dan pengembangan SMP Terbuka model maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif.
- e. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Perluasan kesempatan bagi penduduk buta aksara dilakukan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan, seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi lain yang dapat menjangkau lapisan masyarakat, serta PT.
- f. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah menengah (SM), khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain, juga mengembangkan SM terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.
- g. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan

pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.

- h. Memperluas daya tampung PT yang ada dengan memberikan fasilitasi pada perguruan tinggi untuk membuka program-program keahlian yang dibutuhkan masyarakat dan mengalih fungsikan atau menutup sementara secara fleksibel program-program yang lulusannya sudah jenuh.
- i. Memperluas kesempatan belajar pada perguruan tinggi yang lebih dititikberatkan pada program-program politeknik, pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang berorientasi lebih besar pada penerapan teknologi tepat guna untuk kebutuhan dunia kerja.
- j. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan formal yang sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal dan nonformal.
- k. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah terpencil dan daerah tertinggal, daerah konflik, perbatasan, dan lain-lain, serta mengimplementasikannya dalam berbagai program secara terpadu.
- l. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan serta mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dan atau mempertahankan anaknya untuk tetap bersekolah.
- m. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan pendidikan.
- n. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat TIK lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk

pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif selain menggunakan modul atau tutorial, terutama bagi daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang penduduk.

Kebijakan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut:

1. **Pendanaan biaya operasi Wajar Dikdas 9 Tahun;** adalah kebijakan yang menempati urutan prioritas tertinggi dalam lima tahun ke depan. Hal ini sudah menjadi komitmen nasional seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan kebijakan BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan –pendidikan dasar gratis, yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap.
2. **Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar;** merupakan kebijakan strategis berikutnya, yang akan dilakukan untuk mendukung perluasan aksesdikdas dalam program Wajar Dikdas. Penyediaan sarana/prasarana SD/MI/ sederajat mencakup penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/ sederajat, kegiatan ini diarahkan untuk membangun unit sekolah baru(USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran, yang diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan mutu Dikdas. Pembangunan USB/RKB diutamakan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, untuk mencapai ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 2008/2009.
3. **Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan;** juga merupakan kebijakan strategis untuk mendukung program Wajar Dikdas 9 tahun. Rekrutmen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan kualifikasi guru profesional di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan penyebaran secara geografis, keahlian, dan kesetaraan gender. Pemerataan secara geografis mempertimbangkan pengaturan mekanisme

penempatan dan redistribusi guru, sistem insentif guru di daerah terpencil, pengangkatan guru tidak tetap secara selektif, serta tenaga pendidikan lainnya seperti pamong belajar pada jalur non formal.

4. **Perluasan pendidikan Wajar pada jalur nonformal;** termasuk kebijakan strategis untuk mendukung program Wajar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi (APM/APK) Dikdas melalui program Paket A dan Paket B. Program ini sangat strategis untuk menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik, atau anak-anak yang terpaksa bekerja.
5. **Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 tahun;** merupakan kebijakan dalam rangka memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi penduduk buta aksara. Hal ini dimaksudkan mendorong penduduk usia >15 tahun untuk mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung sesuai dengan standar kompetensi keberaksaraan. Melalui kebijakan strategis ini diharapkan akan menurunkan jumlah penyandang tiga buta, yaitu buta aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar.
6. **Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif;** merupakan kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sehingga memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi bakat istimewa atau kecerdasan luar biasa.
7. **Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia Wajar Dikdas didaerah (bermasalah) terpencil, daerah berpenduduk jarang dan terpencar, daerah bencana, daerah konflik, serta anak jalanan;** adalah kebijakan untuk penduduk yang kesulitan akses karena faktor sosial ekonomi, geografis, sarana transportasi dan komunikasi. Kelompok penduduk yang kurang beruntung karena terisolasi atau hambatan lainnya, mendapat pelayanan khusus, antara lain melalui SD/MI kecil/paket A, SMP/MTs

kecil/paket B, SMP terbuka dan SD-SMP-satu atap, guru kunjung dan kelas layanan khusus di SD (KLK), termasuk layanan dengan memanfaatkan TIK, seperti radio, televisi, komputer dan internet.

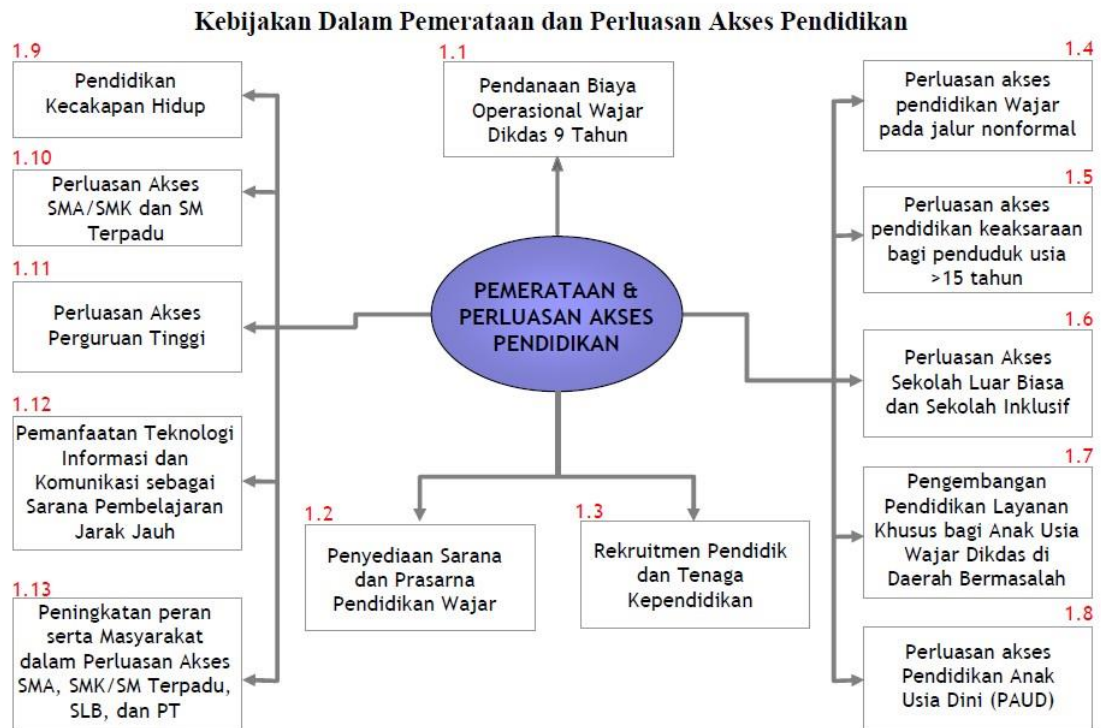
8. **Perluasan akses PAUD;** merupakan kebijakan untuk mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia 0-6 tahun baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Kegiatan Pemerintah lebih diarahkan untuk memberikan dukungan atau pemberdayaan bagi terselenggaranya pelayanan PAUD yang bermutu oleh masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air. Hibah (*blockgrants*) atau imbal swadaya akan diberikan untuk pengembangan PAUD, PAUD model, dan berbagai bentuk integrasi PAUD kedalam berbagai pelayanan anak usia dini lainnya.
9. **Pendidikan kecakapan hidup;** merupakan kebijakan strategis bagi peserta didik yang orang tuanya miskin dan orang dewasa miskin dan/atau pengangguran. Pendidikan ini akan memberikan kompetensi yang dapat dijadikan modal untuk usaha mandiri atau bekerja, mengingat masih besarnya jumlah mereka, maka kegiatan strategis ini menjadi sangat penting peranannya bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
10. **Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu;** arah kebijakan ini lebih untuk memperluas SMK untuk mencapai komposisi jumlah SMA dan SMK yang seimbang pada tahun 2009. Perluasan SMA lebih ditekankan pada partisipasi swasta. Kebijakan ini ditempuh setelah melihat kenyataan bahwa bagian terbesar (65%) penganggur terdidik adalah lulusan pendidikan menengah (Sakernas, BPS2004), yang dapat diartikan sebagai kurangnya keterampilan lulusan pendidikan menengah untuk masuk lapangan kerja.
11. **Perluasan akses perguruan tinggi;** pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi menargetkan pencapaian jumlah mahasiswa meningkat dari 14,3% (tahun 2004) menjadi 18,0% pada tahun 2009. Investasi membangun institusi baru untuk pendidikan tinggi akademik (umum) lebih didorong pada peran swasta, sementara peran Pemerintah lebih pada pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi pada perguruan tinggi yang sudah

ada. Pendidikan tinggi akademik akan diperluas melalui penambahan ruang belajar, laboratorium, ruang praktikum, serta perpustakaan dalam rangka menambah daya tampung.

12. **Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh;** kegiatan prioritas ini ingin mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) di perguruan tinggi, pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk mendukung perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal. Teknologi informasi dan komunikasi akan dimanfaatkan secara optimal dalam fungsinya sebagai media pembelajaran jarak jauh, dan juga untuk memfasilitasi manajemen pendidikan.
13. **Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA, SMK/SM Terpadu, SLB, dan PT;** kegiatan ini termasuk dalam prioritas kebijakan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan: *pertama*, bahwa kemampuan keuangan pemerintah masih terbatas untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya sementara itu ada potensi yang cukup besar pada masyarakat; *kedua*, kecenderungan arah pembangunan pendidikan yang ingin lebih banyak melibatkan partisipasi swasta di segala aspek penyelenggaraan, termasuk investasi, pengelolaan, dan pengawasan; *ketiga*, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Pusat akan lebih banyak memainkan perannya sebagai fasilitator pelayanan publik yang bertugas membuat kebijakan-kebijakan strategis, yang antara lain dilakukan melalui pengendalian dan penjaminan mutu, pengembangan standar-standar, akreditasi, dan sertifikasi dalam rangka desentralisasi pendidikan. Peran yang demikian ingin mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan yang mandiri (otonom), baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat (swasta). Dalam pemberian bantuan operasi penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah tidak lagi membedakan antara kepemilikan negara dan masyarakat/swasta. Program

strategis yang ditetapkan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan digambarkan pada grafik 2.1.

Grafik 2.1



2.3.2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan

nonakademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, Pendidikan Menengah (Dikmen), Pendidikan Non Formal (PNF), sampai dengan Pendidikan Tinggi (Dikti).

Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan padajenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkuat kecerdasan emosional, sosial, dan spritual pesertadidik.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Dalam

pelaksanaannya koordinasi tersebut didelegasikan kepada gubernur atau aparat vertikal yang berkedudukan di provinsi. Manajemen mutu tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan strategis sebagai berikut.

1. Mengembangkan dan menetapkan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumberdaya pendidikan, akreditasi satuan dan program pendidikan, serta upaya penjaminan mutu pendidikan.
2. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah oleh sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ujian nasional mengukur ketercapaian kompetensi siswa/peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (*benchmark*). Hasil ujian nasional tidak merupakan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan tetapi terutama sebagai sarana untuk melakukan pemetaan dan analisis mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.
3. Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnya yang dimaksudkan untuk menentukan faktor penguangkit dalam upaya peningkatan mutu, baik antarsatuan pendidikan, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis dilakukan oleh Pemerintah bersama pemerintah provinsi yang secara teknis dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis itu, diberikan intervensi terhadap satuan dan program (studi) pendidikan di antaranya melalui: pendidikan dan pelatihan terutama pengembangan proses pembelajaran efektif, pemberian bantuan teknis, pengadaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan, serta pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Di samping itu untuk mempercepat tercapainya pemerataan

mutu pendidikan dilakukan pemberian bantuan yang diarahkan pada satuan pendidikan yang belum mencapai standar nasional.

4. Melakukan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian lebih besar pada satuan pendidikan yang kualitasnya rendah, baik dilihat dari input, proses, maupun outputnya.
5. Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan untuk menentukan status akreditasinya masing-masing. Penilaian dilakukan setiap lima tahun dengan mengacu pada SNP. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata hasil ujiannasional dan/atau ujian sekolah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan status akreditasi tersebut. Hasil akreditasi dijadikan sebagai landasan untuk melakukan program pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu setiap satuan atau program pendidikan. Pelaksanaan akreditasi ini dilakukan secara independen oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM), dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF).

Kebijakan untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut:

1. **Implementasi dan penyempurnaan SNP dan penguatan peran Badan SNP;** merupakan Kebijakan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan adanya SNP dan BSNP, penataan berbagai aspek yang menunjang perbaikan mutu akan disusun, diuji coba dan diterapkan serta dikembangkan secara bertahap pada setiap satuan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan nasional.

2. **a. Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP;**

untuk mewujudkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu secara berkelanjutan. Karena itu perlu dikembangkan dan dikelola mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kegiatan utamanya antara lain: pembentukan BAN-

SM,BAN-PNF, BAN-PT; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan; evaluasi; dan ujian nasional untuk mengukur ketercapaian standar pendidikan yang telah ditetapkan; serta pengembangan kapasitas pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta satuan pendidikan.

b. Survei benchmarking mutu pendidikan terhadap standar internasional; bertujuan untuk membandingkan kemampuan peserta didik Indonesia dengan anak di negara-negara lain dalam kemampuan/keterampilan matematika, sains,dan membaca sehingga mutu dan daya saing tingkat internasional peserta didik dapat ditingkatkan secara kompetitif.

3. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM, BAN-PNF dan BAN-PT; akreditasi merupakan kebijakan strategis dalam penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di setiap satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan provinsi. Hasil penilaian akreditasi digunakan sebagai salah satu faktor untuk menentukan bentuk dan besarnya bantuan yang perlu diberikan kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah.

4. a. Pengembangan guru sebagai profesi

Merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Sesuai dengan usaha dan prestasinya, guru akan memperoleh imbal jasa, insentif, dan penghargaan, atau sebaliknya, disinsentif atas tidak terpenuhinya standar profesioleh seorang guru. Pendidikan profesi guru dan sistem sertifikasi profesi pendidikakan dikembangkan baik untuk calon guru (*pre service*) maupun untuk guru yang sudah bekerja (*in service*). Standar profesi guru akan dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerja guru yang dilakukan

secara berkelanjutan atas dasar kinerjanya baik pada tingkat kelas maupun satuan pendidikan.

b. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal

Kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal. Sebagai tenaga profesional yang harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi, sesuai dengan usaha dan prestasinya untuk memperoleh imbal jasa, insentif, dan penghargaan, atau sebaliknya, disinsentif atas tidak terpenuhinya standar profesi. Standar profesi pendidikan nonformal (tutor dan tenaga lapangan pendidikan nonformal) akan dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerjanya, yang dilakukan secara berkelanjutan.

- 5. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;** peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan SNP, analisis kesenjangan kompetensi, serta penyusunan program dan strategi peningkatan kompetensi menuju pada tercapainya SNP.
- 6. Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana;** merupakan kegiatan strategis yang ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak terutama pada Dikdas untuk meningkatkan keamanan/keselamatan, kenyamanan, dan kualitas proses pembelajaran. Untuk mencapai mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dikembangkan sarana dan prasarana pendidikan terutama buku pelajaran dan buku penunjang laboratorium, perpustakaan, ruang praktek, sarana olah raga, sarana ibadah, dan sarana pendidikan lainnya.
- 7. Perluasan pendidikan kecakapan hidup;** merupakan kegiatan strategis dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang mencakup pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam rangka pengembangan kompetensi, kepribadian, kewarganegaraan, intelektual, estetika, dan kinestik pada berbagai

satuan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Tujuannya agar keluaran pendidikan memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang terus berkembang secara mandiri.

8. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten/kota; perluasan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara bertahap akan dikembangkan pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dalam lima tahun ke depan, diharapkan terdapat sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan di setiap kabupaten/kota.

9. Pembangunan sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi/kabupaten/kota; untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerja sama yang konsisten antara Pemerintah dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, untuk mengembangkan SD, SMP, SMA dan SMK yang bertaraf internasional sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia.

10. Mendorong jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar Asia atau 500 besar Dunia; melalui investasi yang signifikan pada sumber-sumber daya pendidikan yang utama seperti dosen, laboratorium, penelitian dan pengembangan, publikasi, perpustakaan yang memadai, serta manajemen pelayanan yang efektif dan akuntabel, sehingga pada tahun 2009 jumlah jurusan yang masuk dalam 100 besar di Asia atau 500 besar dunia dapat dicapai.

11. Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi; investasi dilakukan untuk pengembangan satuan pendidikan pada perguruan tinggi dan sekolah-sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal. Pendidikan kejuruan, advokasi, profesi membutuhkan kualifikasi kompetensi untuk memasuki pasar tenaga kerja, sehingga perlu ada penguatan agar selalu dapat mengacudan memenuhi tuntutan lapangan kerja, standar kualifikasi kerja,

profesionalisme, dan produktifitas kerja yang terus berkembang dalam memenuhi standar nasional dan internasional.

12. a. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI

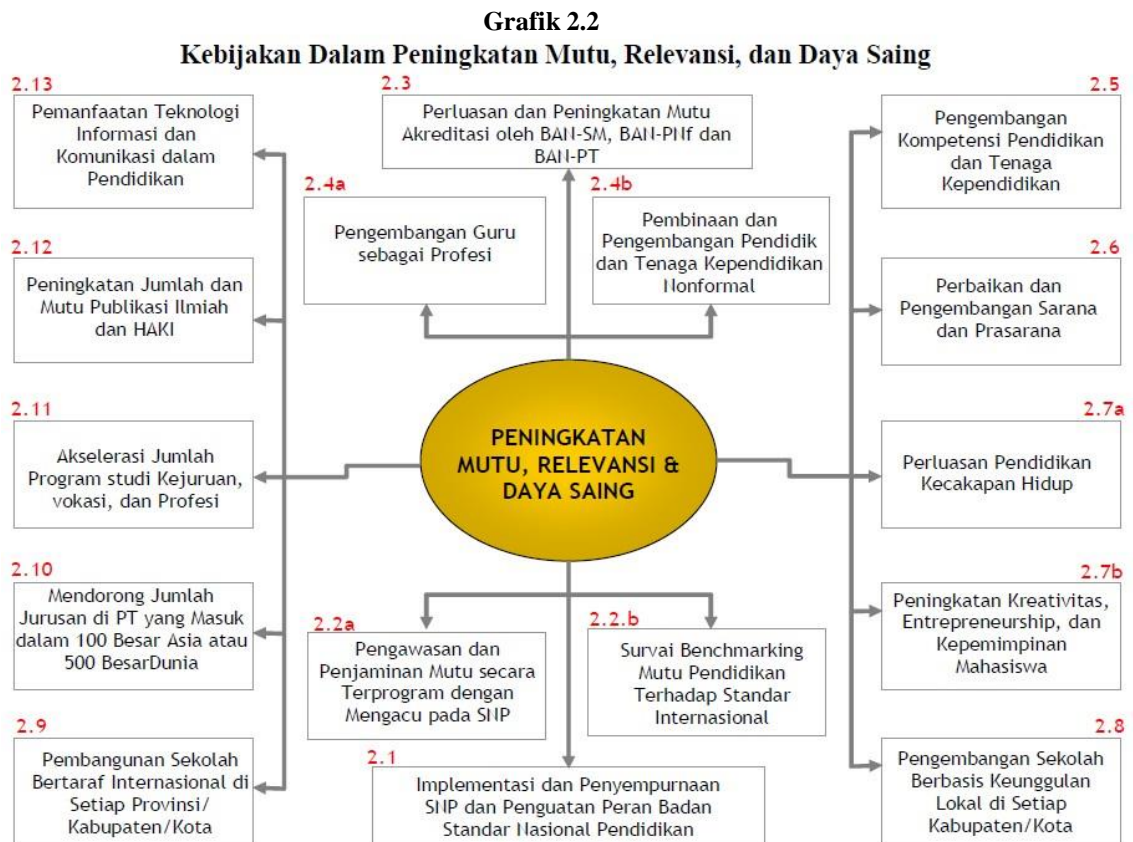
kegiatan ini berkaitan dengan peran perguruan tinggi yang memiliki otonomi keilmuan dengan melakukan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi didorong untuk mampu memberikan pemikiran dan temuan/inovasi yang bermanfaat, baik untuk kepentingan pembangunan maupun untuk pengembangan pengetahuan.

b. Peningkatan kreativitas, entrepreneurship, dan kepemimpinan mahasiswa

Pemberian bekal kepemimpinan serta jiwa *entrepreneur* yang memadai bagi mahasiswa yang mandiri untuk menghadapi tantangan dan kemajuan iptek, serta peka terhadap peluang dan perubahan.

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan; kegiatan ini berupa pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan TIK. Kegiatan ini juga akan mengembangkan sistem jaringan informasi sekolah, infrastruktur dan SDM untuk mendukung implementasinya, baik untuk kepentingan manajemen pendidikan maupun proses pembelajaran. Dengan menggunakan TIK dalam pendidikan siswa pada sekolah reguler, warga belajar pada pendidikan nonformal dan siswa yang memerlukan layanan pendidikan khusus, secara adil dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan.

Program strategis peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara keseluruhan dapat digambarkan pada grafik 2.2.



2.3.3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Disamping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orang tua maupun *stakeholder* lain di setiap tingkat pemerintahan.

Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (*sector-wide approach*) yang bercirikan (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan

secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran *stakeholder* yang lebih luas.

Pemerintah melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikans secara sistemik dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor tersebut di atas. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara *endogeneous* atau perubahan yang didorong secara internal. Perubahan yang didorong secara internal akan lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, serta komitmen bersama.

Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.

Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di Departemen Pendidikan Nasional perlu meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah *mindset* atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal (SPI), pengawasan

masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang.

Sejalan dengan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi, pemerintah pusat mengkoordinasikan manajemen mutu pendidikan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan. Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut di atas terdapat fungsi-fungsibaru yang harus dijalankan oleh pusat maupun daerah. Untuk itu dikembangkan mekanisme yang akan mengatur berbagai fungsi baru yang telah diidentifikasi tersebut dalam suatu struktur, sistem dan mekanisme yang baru didukung oleh peraturan perundangan yang sesuai. Berbagai identifikasi dan kajian mengenai pentingnya fungsi dan institusi baru yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan dalam masa otonomi dan desentralisasi dilakukan secara komprehensif oleh Depdiknas.

Sesuai dengan kerangka pengaturan dan kerangka institusional, disusun kebijakan untuk mendorong terjadinya penguatan kapasitas satuan pendidikan dan program pada setiap tingkatan pemerintahan. Penguatan kapasitas satuan pendidikan atau program pendidikan diorientasikan untuk mencapai status kapasitas tertinggi, yaitu dapat memenuhi atau di atas SNP. Pengembangan

kapasitas dilakukan untuk mendorong agar sebagian besar satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP secara bertahap akan diperkuat sehingga mampu melampaui SNP. Bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi SNP, akan didorong untuk memacu mutunya lebih tinggi lagi hingga dapat mencapai standar internasional. Pada tahun 2009, Pemerintah akan mendorong peningkatan proporsi satuan pendidikan untuk dapat mencapai sama atau di atas SNP setidaknya mencapai 25% SD/MI, 40% SMP/MTs, 50% SMA/MA, dan 50% SMK/MAK pada tahun 2009.

Pengembangan kapasitas diarahkan pada peningkatan kemampuan Kabupaten/kota secara sistematis untuk memberikan pelayanan pendidikan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan SNP. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan pada kabupaten/kota dikembangkan dan diremajakan indikator-indikator kinerja pengelolaan layanan pendidikan, baik pada jalur formal maupun nonformal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam jangka menengah diperkuat kapasitas pengelolaan layanan pendidikan terhadap kabupaten/kota sehingga dapat menambah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas pelayanan sesuai dengan SNP.

Penguatan kapasitas pendidikan tinggi dilakukan melalui pengembangan mekanisme untuk mewujudkan kesehatan organisasi dan otonomi masing-masing perguruan tinggi. Secara keseluruhan, upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan sistem, mekanisme, norma-norma, dan standar yang relevan yang dapat dijadikan acuan bagi masing-masing perguruan tinggi untuk meningkatkan kesehatan institusinya. Pada tahun 2009, diharapkan mekanisme kerja institusi dan aturan perundangan yang diperlukan sudah dapat diselesaikan.

Pengembangan kapasitas bagi setiap tingkat pemerintahan harus diarahkan pada peningkatan efisiensi pendidikan sebagai berikut.

1. Pada tingkat Pemerintah, prioritas pengembangan kapasitas mencakup penataan kelembagaan, penguatan sistem advokasi strategis dan monitoring, perbaikan sistem informasi kinerja dalam memetakan pencapaian SNP oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah.

2. Pada tingkat provinsi, pengembangan kapasitas harus lebih diarahkan pada peningkatan institusi pengelola dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi, yaitu kemampuan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengelola pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang pusat, misalnya pengendalian mutu, penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring program, serta akreditasi. Kapasitas provinsi juga perlu ditingkatkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antarkabupaten/kota.
3. Pada tingkat kabupaten/kota, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam upaya mencapai kemandirian.
4. Pada pendidikan tinggi, terutama dalam masa transisi dari sentralisasi menuju masa desentralisasi, pengembangan kapasitas dilakukan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki keleluasaan dalam pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu secara sehat dan akuntabel. Perguruan tinggi yang sehat memiliki kapasitas untuk merespon lingkungan yang berubah secara otonom dan unik.
5. Pada satuan pendidikan, penguatan kapasitas tercermin dari kemampuan satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya pendidikan agar mendorong kegiatan belajar peserta didik secara optimal.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas satuan pendidikan, sistem monitoring dan evaluasi ditata melalui mekanisme pelaporan kinerja satuan pendidikan. Peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui pemberian bantuan bagi kabupaten/kota untuk melakukan monitoring kinerja pada satuan pendidikan. Melalui suatu tata kelola, sistem audit kinerja akan lebih difokuskan pada

pelaksanaan *block grants* yang tepatsasaran. *Block grants* dilengkapi dengan dana pendamping dari penerima sehingga dapat menimbulkan rasa kepemilikan dari suatu program pembangunan.

Dengan strategi-strategi tersebut di atas akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara sehat melalui peningkatan fungsi kontrol dari *stakeholder* pendidikan dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan pendidikan. Diharapkan dalam lima tahun yang akan datang informasi tentang kinerja satuan pendidikan dapat diakses oleh keluarga dan masyarakat. SMK dan pendidikan tinggi vokasi didorong untuk menyediakan layanan informasi tentang penempatan kerja lulusannya sebagai bagian dari akuntabilitas satuan pendidikan. Penerapan ICT akan dimanfaatkan secara optimal untuk membantu merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel. Model penerapannya dapat diwujudkan melalui media *on-line* yang memuat informasi dan laporan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kepada publik atau *stakeholder* pendidikan lainnya. Dengan media tersebut, partisipasi masyarakat dalam bentukusulan, kritik, atau informasi lainnya dapat diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada pembuat kebijakan.

Kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.

- 1. Peningkatan sistem pengendalian internal berkoordinasi dengan BPKP danBPK;** untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang bersih efektif, efisien,produktif dan akuntabel. Sistem pengendalian internal sangat penting dikembangkan guna mendeteksi penyimpangan secara dini dan menumbuhkan tanggung jawab melalui proses evaluasi diri. Sistem ini tidak hanya dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, tetapi hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan pendidikan juga ditingkatkan.
- 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat Inspektorat Jenderal;** pada tahapan ini, menetapkan program pengembangan aparat pengawas, menjadi

fokus utama di samping pengembangan sistem pengawasan Inspektorat Jenderal Depdiknas. Standar kompetensi auditor telah disusun dan direncanakan digunakan sebagai standar untuk mengukur kompetensi auditor dan mendisain pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal atau nonformal. Pengembangan sistem pengawasan dilakukan melalui pengembangan teknik pengawasan dan pendekatan pengawasan. Audit kinerja sebagai suatu teknik pengawasan dan kemitraan sebagai suatu pendekatan audit yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan yang lebih baik. Pada saat ini audit kinerja dilaksanakan pada pengawasan perguruan tinggi.

- 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran;** kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan berbasis kinerja, melalui: (a) perbaikan kapasitas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program-program Renstra Diknas 2005-2009; (b) pengembangan strategi manajemen kurikulum, bahan ajar dan manajemen pembelajaran untuk identifikasi, advokasi, dan penyebarluasan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan pendidikan tingkat kabupaten/kota dan/atau satuan pendidikan; dan (c) mengembangkan sistem kerja sama untuk perencanaan, pengelolaan, dan monitoring kinerja sistem pendidikan secara menyeluruh. Program pengembangan kapasitas pusat/provinsi bertujuan untuk memberikan bantuan teknis, monitoring kinerja, dan manajemen strategis kepada kabupaten/kota dan satuan pendidikan.
- 4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat;** untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan perlu dilakukan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pengembangan kapasitas para pengelola pendidikan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengembangan kapasitas pengelola pendidikan pada tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan pengelola

pelayanan pada tingkat satuan pendidikan. Pengembangan kapasitas pengelola dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan pengelola dalam pelayanan pendidikan yang efektif, inovatif, efisien, dan akuntabel.

5. **Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;** beberapa kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan akuntabilitas seluruh aparat pengelola pendidikan, melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
6. **Penataan regulasi pengelolaan pendidikan dan penegakkan hukum di bidangpendidikan;** menjawab berbagai permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan, instrumen peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, standar,dan aturan pelaksanaan teknis lainnya menjadi prioritas yang tidak kalah penting untuk terus disempurnakan dan dikembangkan serta penegakkan hukum di bidang pendidikan ditingkatkan.
7. **Peningkatan citra publik;** di samping terus melakukan dan memantau program,kebijakan, dan kegiatan pembangunan nasional, Depdiknas juga perlu melakukan sosialisasi kepada publik tentang apa yang direncanakan, yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukan perbaikan. Selain untuk melakukan sosialisasi, paparan kepada publik juga dapat menjadi sarana peningkatan citra Depdiknas dan Sisdiknas itu sendiri. Melalui paparan tersebut, diharapkan ada masukan dari seluruh masyarakat, khususnya pemerhati pendidikan nasional.
8. **Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan;** pada eradesentralisasi pendidikan ada gejala penurunan kualitas dan kompetensi pengelola pendidikan baik yang berada di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Untuk ini, berbagai bentuk dan model pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut akan dikembangkan.
9. **Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan PemberantasanKKN;** sebagai wujud pelaksanaan Inpres Nomor 5, maka Departemen PendidikanNasional telah menyusun Tim Rencana Aksi Nasional

Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan Surat Mendiknas Nomor 027/P/2005. Rencana aksi ini dilakukan dengan melibatkan secara aktif unit utama Departemen untuk secara dini merencanakan aktifitas kegiatan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selanjutnya diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, atas pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan.

10. Intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh Inspektorat Jenderal;

kegiatan ini dilakukan melalui pengawasan dini yaitu pengawasan oleh Inspektorat Jenderal untuk memeriksa program dan kegiatan yang akan berjalan dari unit kerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dan bertujuan untuk mendeteksi program yang telah disusun, apakah dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

11. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh Itjen, BPKP, dan BPK;

kegiatan intensifikasi pengawasan dilakukan dengan meninggalkan konsep pengawasan internal tradisional, dimana akuntansi dipandang sebagai perhatian utama pengawasan internal, menuju konsep pengawasan modern, dimana pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang menuntut peran yang lebih daripada sebagai kontrol tetapi juga sebagai supervisor. Penggunaan dan pengembangan teknik pengawasan juga menjadi prioritas dalam program pengawasan Inspektorat Jenderal. Pengawasan kinerja menjadi tekanan pengawasan sesuai dengan basis pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan kinerja. Kegiatan ekstensifikasi dilakukan melalui peningkatan jumlah aparat pengawasan (auditor pendidikan), perluasan jumlah sasaran pengawasan, dan lama hari pengawasan.

12. Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Itjen, BPKP,

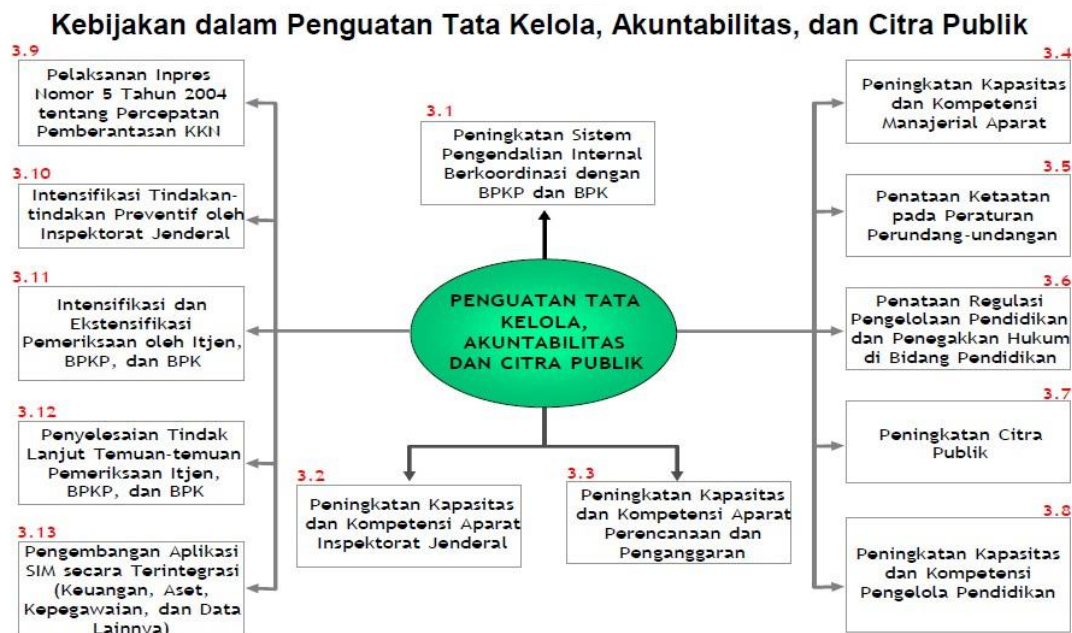
dan BPK; pengawasan tidak akan ada maknanya apabila pemeriksaan tidak ditindaklanjuti. Untuk itu diperlukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan oleh obyek pemeriksaan, untuk mengetahui apakah tindak lanjut yang dilaksanakan telah sesuai dengan rekomendasi pemeriksa.

Selanjutnya ditentukan pencapaian jumlah dan kualitas atas tindak lanjut/penyelesaian temuan tersebut.

13. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi (keuangan, aset, kepegawaian, dan data lainnya); sangat disadari bahwa data-data (keuangan, program, aset, SDM, dan sebagainya) yang ada saat ini seolah-olah saling terpisah. Padahal seyogyanya data itu merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Membangun sistem yang dapat mengintegrasikan semua data yang dibutuhkan dalam mengelola Departemen menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Selain untuk memperkecil terjadinya kesalahan manusia (*human error*), sistem tersebut dapat mengurangi pengulangan kegiatan pencatatan.

Program strategis penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik sebagaimana digambarkan pada grafik 2.3.

Grafik 2.3



BAB III

KONDISI UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

3.1 Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Inhil

Kabupaten **Indragiri Hilir** resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki ||Negeri Seribu Parit|| yang sekarang terkenal dengan julukan “**NEGERI SERIBU JEMBATAN**” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak ditinggikan 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.



Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau.

3.2 Administrasi Pemerintahan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten ini berdiri sebagai Daerah Tingkat II dengan nama Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1965 dengan ibukota Tembilahan. Pada tahun 2005, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wilayah administrasi 20 kecamatan, 18 desa, dan 174 kelurahan. Pada tahun 2011, terjadi pemekaran desa menjadi 203 desa, dan 33 kelurahan.

Adapun 20 kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Keritang dengan ibukota Kota Baru
2. Kecamatan Kemuning dengan ibukota Selensen
3. Kecamatan Reteh dengan ibukota Pulau Kijang
4. Kecamatan Sungai Batang dengan ibukota Benteng
5. Kecamatan Enok dengan ibukota Enok
6. Kecamatan TanahMerah dengan ibukota Kuala Enok
7. Kecamatan Kuala Indragiri dengan ibukota Sapat
8. Kecamatan Concong dengan ibukota Concong
9. Kecamatan Tembilahan dengan ibukota Tembilahan
10. Kecamatan Tembilahan Hulu dengan ibukota Tembilahan Hulu
11. Kecamatan Tempuling dengan ibukota Sungai Salak
12. Kecamatan Kempas dengan ibukota Harapan Tani
13. Kecamatan Batang Tuaka dengan ibukota Sungai Piring
14. Kecamatan Gaung Anak Serka dengan ibukota Teluk Pinang
15. Kecamatan Gaung dengan ibukota Kuala Lahang

16. Kecamatan Mandah dengan ibukota Khairiah Mandah
17. Kecamatan Kateman dengan ibukota Sungai Guntung
18. Kecamatan Pelangiran dengan ibukota Pelangiran
19. Kecamatan Teluk Belengkong dengan ibukota Saka Rotan
20. Kecamatan Pulau Burung dengan ibukota Pulau Burung

Sebagaimana wilayah kabupaten lainnya, Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dan seorang Wakil Bupati. Dalam administrasi pemerintahan sehari-hari, Bupati/Wakil Bupati selain dibantu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengawas, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga didukung oleh 16 Dinas, 9 Badan, dan 3 Kantor. Adapun Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Pekerjaan Umum
7. Dinas Pertambangan dan Energi
8. Dinas Koperasi dan UMKM
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
10. Dinas Pendapatan
11. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
12. Dinas Perkebunan
13. Dinas Kehutanan
14. Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
20. Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah
21. Badan Kepegawaian Daerah
22. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24. Badan Lingkungan Hidup
25. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
26. Satuan Polisi Pamong Praja
27. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
28. RSUD Puri Husada Tembilahan

3.3 Demografi

Berdasarkan data tahun 2011, penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 685.698 jiwa, dengan rerata 4 jiwa per rumah tangga. Kecamatan Tembilahan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 72.001 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang yaitu 12.248 jiwa.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 59 jiwa per km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Tembilahan dengan tingkat kepadatan 365 jiwa per km², sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan Tingkat Kepadatan 26 jiwa per km².

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 346.788 jiwa penduduk perempuan berjumlah 338.910 jiwa

Sebaran penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1.
Sebaran penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan kelompok umur
Tahun 2011

No	Kecamatan	Kelompok Umur (Tahun)				
		0 sd 4	5 sd 14	15 sd 44	45 sd 64	65+
1	Keritang	4.857	8.663	13.755	3.349	1.195
2	Kemuning	1.262	4.591	7.38	2.17	311
3	Reteh	2.563	3.543	11.482	3.254	651
4	Sungai Batang	563	1.197	3.06	975	285
5	Enok	3.251	4.308	6.279	1.785	1.753
6	Tanah Merah	1.6	2.636	7.7	3.151	478
7	Kuala Indragiri	1.025	2.07	4.695	1.543	405
8	Concong	446	1.782	3.11	1.152	176
9	Tembilahan	4.095	6.235	18.053	6.341	1.019
10	Tembilahan Hulu	3.739	5.411	8.451	3.602	644
11	Tempuling	568	4.61	6.964	2.565	721
12	Kempas	1.518	4.508	7.442	2.926	772
13	Batang Tuaka	2.274	2.823	6.575	1.787	397
14	Gaung Anak Serka	240	3.512	5.208	1.805	191
15	Gaung	2.203	5.053	9.503	3.086	428
16	Mandah	1.182	4.397	10.723	3.378	273
17	Kateman	3.483	4.503	12.282	2.613	387
18	Pelangiran	1.082	1.808	18.718	1.501	524
19	Teluk Belengkong	707	1.131	5.341	1.234	140
20	Pulau Burung	378	2.306	7.536	1.151	290

Sumber: BPS, 2011

3.4 Geografi

Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada posisi 0°36' Lintang Utara sampai dengan 1°07' Lintang Selatan dan 104°10' sampai dengan 102°32' Bujur Timur, dengan wilayah seluas 11.605,97 km². Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, topografi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut, daerah hutan payau (mangrove) yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan rata-rata ketinggian 0-3 meter dari permukaan laut. Hanya 6,69% dari total luas wilayah berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut, terdapat di bagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Propinsi Jambi.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang banyak dilewati sungai, baik sungai kecil maupun besar. Ada 12 sungai terdapat di Indragiri Hilir, yaitu Sungai Indragiri, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Guntung, Sungai Danai, Sungai Kateman, Sungai Batang, Sungai Enok, Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, dan Sungai Terab. Dari total luas wilayah, 11.605,97 km² merupakan wilayah daratan dan 7.207,00 km² merupakan wilayah perairan.

3.5 Sosial, Ekonomi dan Budaya

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa tidak harus selalu melalui jalur pendidikan informal saja, akan tetapi dapat juga melalui jalur pendidikan nonformal. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana komunikasi informasi ilmu pengetahuan untuk disampaikan kepada masyarakat yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai informasi dan ilmu pengetahuan baik yang berupa buku maupun bahan rekaman lainnya yang diorganisasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pemakai perpustakaan.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2011 adalah 16 buah. Terdiri dari satu perpustakaan daerah, 5 perpustakaan keliiling, 10 UPT Perpustakaan.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Pada tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki fasilitas 5 Rumah Sakit, 3 Rumah Bersalin, 25 Puskesmas, dan 533 Posyandu.

Realisasi penerimaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2011 adalah 1.385,9 milyar rupiah atau naik sekitar 31,15 % dari tahun 2010 yang berjumlah 1.056,7 milyar rupiah. Realisasi penerimaan terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu 1.208 milyar rupiah atau sekitar 87,16 persen dari total penerimaan. Sedangkan realisasi penerimaan terkecil berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu 54,38 milyar atau hanya menyumbang 3,92 % dari total penerimaan.

Penyumbang terbesar realisasi penerimaan dari Dana Perimbangan adalah DAU sebesar 47,45 % kemudian diikuti oleh bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 47,10 %, dan sisanya 5,45 % berasal dari DAK. Realisasi pengeluaran Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2011 adalah 1.229,3 milyar rupiah terdiri dari belanja langsung sebesar 613,7 milyar rupiah atau 49,92 % dari total pengeluaran dan belanja tidak langsung 615,6 milyar rupiah atau 50,08 % dari total pengeluaran.

Jumlah koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2011 adalah 494 buah dengan anggota sebanyak 32.536 orang. Jumlah koperasi yang aktif berjumlah 230 buah (46,56 %). Sedangkan 264 buah (53,44 %) tidak aktif. Dari total 494 buah koperasi tersebut memiliki volume usaha sebesar 70.166,41 milyar rupiah dan SHU sebesar 1.670,84 milyar rupiah.

Inflasi kota Tembilahan tahun 2011 sebesar 5,08 persen, sementara untuk tingkat nasional terjadi inflasi sebesar 3,79 persen. Hasil pantauan harga barang dan jasa di Tembilahan selama tahun 2011 setiap bulan yang dilakukan BPS, sebanyak 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan lainnya mengalami deflasi.

Diawal tahun 2011 yaitu di bulan Januari terjadi inflasi sebesar 1,96 persen, kemudian di bulan Februari terjadi inflasi sebesar 0,03 persen. Bulan Maret terjadi deflasi sebesar 0,67 persen, serta di bulan April masih mengalami deflasi sebesar 0,97 persen. Pada bulan-bulan berikutnya (Mei sampai dengan Desember) berturut-turut terjadi inflasi masing-masing besarnya 0,16 persen; 0,50 persen; 0,88 persen; 0,99 persen; 0,79 persen; 0,50 persen; 0,14 persen dan 0,71 persen.

Selama tahun 2011 inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 1,96 persen dan terendah pada bulan Februari sebesar 0,03 persen, sedangkan deflasi terjadi pada Bulan Maret sebesar 0,67 persen dan April sebesar 0,97 persen. Berdasarkan hasil pantauan harga barang dan jasa yang dilakukan BPS selama tahun 2011, penyebab terjadinya inflasi sebesar 5,08 persen adalah naiknya indeks beberapa kelompok pengeluaran pada Indeks Harga Konsumen (IHK).

Wilayah pesisir, termasuk wilayah hutan mangrove, menjadi salah satu pilihan tempat hidup masyarakat Indragiri Hilir. Indragiri Hilir Dalam Angka (2012) menyebutkan setidaknya 200.000-an orang mendiami wilayah pesisir kabupaten ini. Angka ini menunjukkan 30% dari total penduduk Indragiri Hilir. Dipilihnya wilayah pesisir sebagai tempat hidup ini terkait dengan kondisi budaya, sejarah, kebutuhan ekonomis, dan geografis. Secara budaya, suku Duano memang tidak dapat dipisahkan dari laut, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun kehidupan keseharian suku ini selalu dihabiskan di wilayah laut. Hal ini menyebabkan suku ini tidak pernah mendiami wilayah daratan yang jauh dari laut. Saat ini terdapat setidaknya 15.000-an jiwa suku Duano yang mendiami di hampir seluruh desa di sepanjang pesisir Kabupaten Indragiri Hilir. Secara umum suku ini menyebar di 7 kecamatan, yaitu Kateman, Mandah, Concong, Kuala Indragiri, Tanah Merah, Kuala Sungai Batang, dan Reteh.

Kehadiran suku Bugis dari Sulawesi dan Banjar dari Kalimantan dalam waktu yang lama juga menjadi aspek sejarah mengapa di wilayah pesisir menjadi tempat hidup bagi masyarakat Indragiri Hilir. Saat ini kedua suku ini, termasuk

suku Melayu, umumnya yang mendiami wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir adalah bermatapencaharian sebagai nelayan atau pedagang antar pulau.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang umumnya terdiri atas laut dan sungai-sungai kecil (masyarakat setempat menyebutnya parit), dan minimnya sarana prasarana transportasi darat, maka mendiami desa-desa di wilayah pesisir menjadi pilihan hidup. Keberadaan desa-desa di pinggir laut atau sungai ini menjadi pilihan dengan alasan memudahkan akses ke sarana transportasi dan akses ke luar desa.

Keragaman suku dan pengaruh dari berbagai tata kehidupan pesisir ini membentuk budaya masyarakat yang mendiami wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam tatanan budaya tradisional, masing-masing suku tetaplah dalam budaya asal, misalnya tradisi perkawinan, dan budaya tradisional lainnya. Tetapi dalam keseharian, budaya melaut, perdagangan antar pulau (termasuk *smuggle*), tata perumahan, sarana transportasi, dan berbagai budaya kehidupan lain sangat dipengaruhi oleh kondisi yang tersedia di wilayah pesisir.

Umumnya masyarakat pesisir secara tradisional melaut sebagai nelayan ikan tangkap dilakukan dengan berbagai alat tangkap dan menggunakan kapal dengan kapasitas kecil yang biasa disebut pompong, ada juga yang masih menggunakan perahu sampan tanpa mesin. Alat tangkap yang digunakan masih tergolong sederhana. Secara kelembagaan antar kampung, disepakati bahwa tidak dibolehkan menggunakan alat tangkap yang merusak perairan seperti sondong, dan alat tangkap yang menangkap ikan pada semua kelompok umur dan ukuran seperti pukat harimau.

Masyarakat pesisir dari dahulu dikenal sebagai kaum saudagar yang berniaga antar pulau. Perniagaan ini umumnya menggunakan kapal berukuran sedang, rerata dengan kapasitas muatan 20-40 ton. Pelayaran antar pulau sangat mengandalkan keahlian dalam menentukan arah. Selain menggunakan kompas sebagai penunjuk arah, umumnya kapten kapal secara tradisional sangat ahli menggunakan ilmu perbintangan dalam menentukan arah.

Struktur perumahan di perkampungan pesisir secara tradisional terbentuk dengan sendirinya untuk menyesuaikan kondisi alam lingkungan. Di wilayah pesisir, dengan kondisi tanah berlumpur, terpaan angin laut yang kencang, serta adanya hempasan gelombang, mengharuskan perumahan dibangun berdempetan sedemikian rupa. Struktur ini menyebabkan semua rumah harus dibangun berdempetan dengan prinsip untuk –saling menguatkan. Kondisi fisik perumahan ini memberikan dampak sosial yang akrab pada masyarakat wilayah pesisir.

Jumlah Buta Aksara atau Keaksaraan Fungsional (KF) usia 14-44 tahun (usia produktif untuk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2004) terdapat 9.682 Orang. Hingga tahun 2008 jumlah warga belajar yang masih dikategorikan Buta Huruf sebanyak 8.763 orang sedangkan pada tahun 2009 warga belajar Buta Aksara sebanyak 3.472 orang dan pada tahun 2009 ini pemberantasan Buta Aksara sebanyak 1.720 orang, sisa untuk tahun berikutnya tinggal sebanyak 1.752 orang.

Selama kurun waktu 5 tahun kelompok yang ada belum mampu menampung warga belajar yang ada, hal ini disebabkan tempat kegiatan Paket A, B dan C antara satu kelompok belajar dengan kelompok belajar lainnya sulit disatukan karena wilayah geografis sangat sulit dijangkau karena rumah wajib belajar terpencar-pencar. Selain itu belum adanya bantuan dana untuk pelaksanaan pendataan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan paket tersebut. Keterlambatan pemberantasan buta aksara hal ini disebabkan warga masyarakat yang terpencar-pencar.

Pembangunan pendidikan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kemampuan pemerintah dan daerah dalam rangka penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global. Pembangunan pendidikan daerah Riau merupakan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Pembangunan manusia dewasa ini menghadapi sejumlah tantangan besar yang berdimensi global tantangan ditandai oleh makin ketatnya kompetisi antar bangsa dalam merebut peluang pasar

berbagai aspek. Untuk itu pendidikan sangat menentukan kemampuan daerah untuk bersaing secara global.

3.6. Transportasi dan Komunikasi

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah dengan rentang jarak antar kota maupun perkambungan yang relatif berjauhan. Hal ini disebabkan topografi wilayah dataran rendah dengan banyak sungai. Kondisi ini menyebabkan beragamnya moda transportasi yang tersedia di daerah ini ,baik darat, laut maupun udara. Hubungan antar kota atau perkambungan wilayah perairan biasanya dilayani dengan menggunakan kapal kecil (biasa disebut pompong), dan speed boat. Moda transportasi perairan ini bukan hanya melayani antara desa, tetapi juga melayani transportasi antar provinsi, misalnya ke Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, jumlah angkutan barang yang terdaftar pada tahun 2011 adalah 166. Terdiri dari 94 angkutan sembako, 22 angkutan batu bara, dan 50 angkutan CPO. Jumlah angkutan penumpang (PO) yang terdaftar adalah 8 AKAP, 13 AKDP, 14 sewa/travel, dan 20 angkutan perdesaan, sedangkan bus pariwisata hanya ada satu.

Pada tahun 2011 panjang jalan kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir 2.055,92 km yang terdiri dari 610,60 km jalan aspal; 172,00 km jalan kerikil, 1.147,32 km jalan tanah, dan sisanya 126,00 km cor beton.

Untuk sistem komunikasi, pada tahun 2011 jumlah surat yang dikirim dan diterima melalui kantor pos tembilahan mengalami penurunan. Jumlah surat yang dikirim adalah 35.768. Terdiri dari 27.297 surat terdaftar, 5.527 surat biasa, 2.896 paket pos dan 48 surat luar negeri. Sedangkan jumlah surat yang diterima sebanyak 90.958 terdiri dari 83.111 surat terdaftar, 4.095 surat biasa, 3.697 paket pos, dan 55 surat luar negeri. Selain sistem komunikasi manual melalui pos, secara umum wilayah Kabupaten Indragiri Hilir juga sudah dilayani dengan sistem komunikasi seluler dari berbagai pihak swasta.